

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderting

Juita Sukraini¹, Ayang Surya Mardita²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia

ayangsuriam@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine : (1) Does the board's knowledge of the budget affect regional financial oversight; (2) Is the organizational commitment able to moderate the relationship between the board's knowledge of the budget and regional financial oversight; (3) Can public policy transparency moderate the relationship between the board's knowledge of the budget and regional financial oversight.

This research was conducted at the Solok City and Regency DPRD Offices. The data used are primary data. The sample technique used is saturated sample by distributing questionnaires. The result indicated that : (1) The Board's knowledge of the Budget has a significant effect on Financial Supervision in the City and District of Solok; (2)Organizational commitment strengthens the relationship between the board's knowledge of the budget and regional financial oversight in the City and District of Solok; (3) Public policy transparency strengthens the relationship between the council's knowledge of the budget and regional financial oversight in the City and District of Solok.

Keywords: *Board Knowledge of Budget, Organizational Commitment, Public Policy Transparency, Regional Financial Oversight*

Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah berimplikasi positif terhadap kedudukan, fungsi, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama- sama dengan Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan diharapkan dapat lebih aktif dalam menangkap aspirasi dari masyarakat dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang- undangan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya otonomi daerah dapat tercipta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Peningkatan kualitas pelayanan umum demi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keterlibatan masyarakat yang ikut andil dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya. Terkait dengan itu pemerintah berupaya mewujudkan keseimbangan antara kemampuan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Peraturan Pemerintah, 2005b) tentang

pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132, menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan pengawasan pada pelaksanaan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Permatasari, 2019) kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Prasetya (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Dengan memperhatikan pentingnya pengetahuan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, seperti yang telah diteliti oleh (Prasetya, 2014; Safitri & Sari, 2018) maka fenomena yang sama juga akan terjadi pada berbagai kabupaten dan kota di daerah yang berbeda. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Transparansi kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (Utama, 2015).

Transparansi kebijakan pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Informasi tersebut harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi (Mursalini, 2013).

Landasan Teori

Sasongko dan Parulian (2015;2), "Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan". Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa institusi kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan.

Halim dan Iqbal (2012;37) "secara umum pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi".

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja yang dalam hal ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai yang ingin

dicapai dalam organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demikepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetapmenjadi bagian dari organisasi kerja tersebut (Permatasari, 2019).

Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanyaketerbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalamkehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBD berkewajiban untuk terbuka danbertanggungjawabterhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan (Setyawati, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakanPendekatan Asosiatif. Oleh karena itupenelitian ini mengutamakan penelitian terhadap data dan fakta empirisdengan menggunakan sumber data primer (kuesioner). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota dan Kabupaten Solok periode 2019 sampaidengan periode 2024. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Dimana pengambilan sampel didasarkan jumlah totalpopulasi atau sampel yang ada yaitu seluruh anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) periode 2019 sampai dengan periode 2024. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentukpersepsiresponden melalui pendistribusian secara langsung kepada anggota DPRDperiode 2019 sampai dengan periode 2024 di Kota dan Kabupaten Solok. Teknik yang digunakandalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu survai dengan caramemberikan kuesioner kepada seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok(Mursalini et al., 2017).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasidari alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk melihatvaliditas dari masing-masing item kuesioner, dapat dilihat dengan pengujian validitas instrumen menggunakan *software* statistik. Nilai validitas dapatdilihat pada *Pearson Correlation*. Data dikatakan valid apabila rhitung > rtabel.

**Hasil Uji Validitas
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1)**

Item – Total Statistics

No Item	r hitung	(r tabel) 5%	Keterangan
X1.1	0,866	0,2759	Valid
X1.2	0,812	0,2759	Valid
X1.3	0,827	0,2759	Valid
X1.4	0,61	0,2759	Valid
X1.5	0,84	0,2759	Valid
X1.6	0,759	0,2759	Valid
X1.7	0,811	0,2759	Valid

Sumber :*Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 7item pertanyaan yang dikatakan valid,dimana rhitung masing-masingitem pertanyaan lebih besar dari tabel. Dalam uji ini didapatkan hasilbahwa rhitung > rtabel 0,2759, yang membuktikan bahwa data tersebutvalid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi (X2)
Item – Total Statistics

No Item	r hitung	(r tabel) 5%	Keterangan
X2.1	0,816	0,2759	Valid
X2.2	0,882	0,2759	Valid
X2.3	0,906	0,2759	Valid
X2.4	0,92	0,2759	Valid
X2.5	0,86	0,2759	Valid
X2.6	0,895	0,2759	Valid
X2.7	0,833	0,2759	Valid
X2.8	0,874	0,2759	Valid
X2.9	0,833	0,2759	Valid

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 9item pertanyaan yang dikatakan valid, dimana rhitung masing-masingitem pertanyaan lebih besar dari rtabel. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa rhitung > rtabel 0,2759, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Hasil Uji Validitas
Transparansi Kebijakan Publik (X3)
Item – Total Statistics

No Item	r hitung	(r tabel) 5%	Keterangan
X3.1	0,825	0,2759	Valid
X3.2	0,658	0,2759	Valid
X3.3	0,774	0,2759	Valid
X3.4	0,715	0,2759	Valid
X3.5	0,752	0,2759	Valid
X3.6	0,876	0,2759	Valid
X3.7	0,746	0,2759	Valid

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 item pertanyaan yang dikatakan valid, dimana rhitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari tabel. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa rhitung > rtabel 0,2759, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

**Hasil Uji Validitas
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)
Item – Total Statistics**

No Item	r hitung	(r tabel) 5%	Keterangan
Y1	0,814	0,2759	Valid
Y2	0,806	0,2759	Valid
Y3	0,758	0,2759	Valid
Y4	0,872	0,2759	Valid
Y5	0,843	0,2759	Valid
Y6	0,922	0,2759	Valid
Y7	0,767	0,2759	Valid
Y8	0,833	0,2759	Valid
Y9	0,903	0,2759	Valid
Y10	0,829	0,2759	Valid
Y11	0,804	0,2759	Valid

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 11item pertanyaan yang dikatakan valid, dimana rhitung masing-masingitem pertanyaan lebih besar dari tabel. Dalam uji ini didapatkan hasilbahwa rhitung > rtabel 0,2759, yang membuktikan bahwa data tersebutvalid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan,maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisiendapat dilihat pada tabel *Cronbach's Alpha*. Untuk menguji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakinbaik. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

**Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1)Realibility Statistics**

Cronbach's Alpha	Nilai Standarisasi	Keterangan
0,9	0,6	Reliabel

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan 7 item pertanyaan dapat dikatakan reliabel karna hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,900 > 0,60 dengan tingkat keterandalansangat tinggi.

**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi (X2)
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Nilai Standarisasi	Keterangan
0,961	0,60	Reliabel

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Komitmen Organisasi dengan 9 item pertanyaan dapat dikatakan reliabel karna hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar $0,961 > 0,60$ dengan tingkat keterandalan sangat tinggi.

**Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X3) Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Nilai Standarisasi	Keterangan
0,880	0,60	Reliabel

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Transparansi Kebijakan Publik dengan 7 item pertanyaan dapat dikatakan reliabel karna hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar $0,880 > 0,60$ dengan tingkat keterandalan sangat tinggi.

**Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y) Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Nilai Standarisasi	Keterangan
0,955	0,60	Reliabel

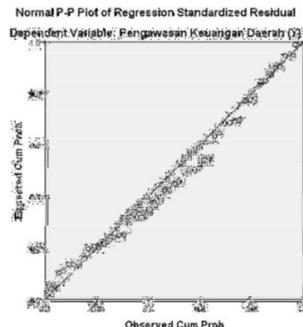
Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pengawasan Keuangan Daerah dengan 11 item pertanyaan dapat dikatakan reliabel karna hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar $0,955 > 0,60$ dengan tingkat keterandalan sangat tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak membentuk garis lain. Dapat disimpulkan variabel independen yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1), Komitmen Organisasi (X2), dan Tranparansi Kebijakan Publik (X3) menyebar dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga data variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1), Komitmen Organisasi (X2), dan Transparansi Kebijakan Publik (X3) memenuhi uji normalitas dan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji asumsi Multikolinearitas ini dimaksudkan untuk memberikan ataumenguji ada tidaknya hubungan liner antara variabel bebas (*independent*)satu dengan variabel bebas (*independent*) yang lainnya.Model regresi yangbaik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel *independent*. Dasarpengambilan keputusan adalah apabila nilai *tolerance* > 0,1 atau samadengan nilai VIF<10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalammodel regresi.Hasil perhitungan VIF untuk pengujian multikolinearitasantara sesama variabel bebas dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Uji MultikolinearitasCoefficients^a

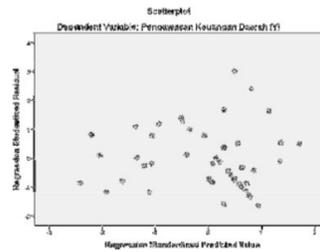
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0,469	2,134
Komitmen Organisasi	0,394	2,536
Transparansi Kebijakan Publik	0,472	2,120

Sumber : Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Dari hasil output pada uji multikolinearitas didapatkan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel > 0,1 dan nilai VIF untuk masing-masingvariabel < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Sehingga penelitian ini dapat untukditeliti lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modelregresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan denganpengamatan lain, model yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas.Pendektesian mengenai ada tidaknya polatertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbuY yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telahdistudentized.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan *scatterplot* diatas terlihat titik menyebar secara acak sertatersebar diatas maupun dibawah angka Nol pada sumbu Y, maka dapatdisimpulkan dalam modelregresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruhvariabel independen yaitu Pengetahuan Tentang Anggaran (X1), KomitmenOrganisasi (X2), Transparansi Kebijakan Publik (X3) terhadap variabeldependen Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

Hasil Uji Regresi Linear SederhanaCoefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,476	3,846		2,724	0,009
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1)	1,186	0,138	0,775	8,595	0

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan nilai koefesien regresi berganda sebagaimana terlihatpada tabel 4.20 dapat dibuat persamaan regresi yaitu:

$$Y = 10,676 + 1,186X1 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear sederhana diatas maka dapatdianalisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta () bernilai 10,476 yang artinya jika PengetahuanTentang Anggaran (X1) sama dengan 0 Pengawasan Keuangan Daerah(Y) sudah ada sebesar 10,476 satuan .
2. Koefisien regresi (b) bernilai 1,186 yang artinya untuk variabelPengawasanKeuangan Daerah (Y) diperoleh sebesar 1,186. Angka inimiliki arti bahwa dengan meningkatkan nilai variabel PengetahuanTentang Anggaran (X1) misalnya sebesar (1) satuan maka PengawasanKeuangan Daerah (Y) akan meningkat sebesar 1,186 satuan.

Hasil Koefisien Determinasi (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,775 ^a	0,601	0,593	4,32

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Dari tabel di atas diketahui bahwa *R Square* sebesar 0,593 atau 59,3%. Hal ini mengidentifikasi bahwa Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 59,3%. Sedangkan sisanya 40,7% diberikan kontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) adalah salah satu statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai *R square*. *R square* merupakan regresi dengan variabel bebasnya satu sampai dua variabel maka digunakan *R Square* sebagai koefisien determinasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Coefficients**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,898 ^a	0,806	0,794	3,077

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R square* (koefisien determinasi) sebesar 0,794. Hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel independen yaitu pengetahuan tentang anggaran (X1), komitmen organisasi (X2), transparansi kebijakan publik (Y) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 79,4%, sedangkan sisanya 20,6% dipengaruhi oleh variabel lain selain X1, X2, X3. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti : Partisipasi Masyarakat (Setyawati, 2010), Good Government (Rahmansyah, 2014), Pengawasan APBD (Permatasari, 2019).

Uji Hipotesis Uji T (Parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain dianggap konstan. Kriteria pengujian dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	4,07	3,132		1,3	0,2
Pengetahuan dewan tentang anggaran	0,45	0,144	0,294	3,133	0,003
Komitmen organisasi	0,419	0,098	0,439	4,296	0
Transparansi Kebijakan Publik	0,437	0,149	0,273	2,923	0,005

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai signifikan <0,05. Untuk variabel independen yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran(X1) nilai thitung 3,133 dan nilai sig adalah 0,003 dengan demikian dapat disimpulkan thitung > ttabel yakni 3,133 > 2,011 dengan signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 menunjukkan bahwa Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran(X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dan hipotesis diterima.

Persamaan Regresi Ganda untuk Uji Interaksi

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi dari regresi linear berganda, dimana persamaannya mengandung unsur interaksi perkali dua atau lebih dari variabel independen. Analisis MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikandasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Dengan menggunakan *moderated regression analysis* ini, maka persamaan regresi penelitian ini adalah :

1. Persamaan Regresi Ganda Untuk Uji Interaksi $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1 \cdot X_2$

Berikut ini adalah persamaan regresi ganda untuk uji interaksi 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hasil Persamaan Regresi Ganda Untuk Uji Interaksi I Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig
	B	Std. Error			
1 (Constant)	9,94	12,71		0,782	0,438
Pengetahuan dewan tentang anggaran (X)	0,501	0,517	0,328	0,968	0,338
Komitmen Organisasi (X2)	0,505	0,394	0,53	1,282	0,206
Pengetahuan tentang anggaran (X1) * komitmen organisasi (X2)	0,002	0,015	0,084	0,124	0,902

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Dari pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, model regresi linear berganda mengukur pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Maka persamaan interaksi 1 adalah :

$Y = 9,940 + 0,501X_1 + 0,505X_2 + 0,002 X_1X_2$

Dari hasil persamaan interaksi 1 diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 9,940 artinya apabila semua variabel bebas yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Komitmen Organisasi dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka hasil dari persamaan regresi ganda untuk uji interaksi 1 berpengaruh positif. Konstantapositif artinya terjadi peningkatan jumlah dari variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 9,940satuan.
2. Rasio Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran memiliki koefisien interaksi 1 positif sebesar 0,501 artinya Pengetahuan TentangAnggaran mengalami kenaikansatu satuan , maka PengawasanKeuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,501 satuan.
3. Komitmen organisasi memiliki koefisien regresi ganda untuk ujiinteraksi 1 sebesar 0,505 artinya jika Komitmen Organisasi mengalamikenaikan satu satuan, maka Pengawasan Keuangan Daerah mengalamikenaikan sebesar 0,505 satuan.Moderating memiliki koefisien regresi ganda untuk uji interaksi 1positif sebesar 0,002 artinya jika moderating mengalami peningkatansatu satuan, maka Pengawasan Keuangan Daerah akan mengalamipeningkatan sebesar 0,002%.

Koefisien bernilai positif artinya antar Moderating dan Pengawasan KeunganDaerah mempunyai hubungan positif.

2. Persamaan Regresi Ganda Untuk Uji Interaksi II

Hasil Persamaan Regresi Ganda Untuk Uji Interaksi IICoefficients^a

1	Model (Constant)	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t
		B	Std. Error		
	Model (Constant)	-6,523	18,638		-0,35
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	1,07	0,696	0,7	1,538
	Transparansi Kebijakan Publik	1,083	0,732	0,678	1,479
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran * Transparansi Kebijakan Publik	-0,013	0,026	-0,391	-0,484

Sumber :Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Dari pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, model persamaan Regresi Ganda Untuk Uji interaksi 2 mengukur pengaruh X1 dan X2 terhadap Y.Maka persamaan regresi ganda untuk uji interaksi 2 adalah : $Y = -6,523 + 1,070X1 + 1,083X3 - 0,013X1X3$

Dari hasil persamaan interaksi 2 diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar -6,523 artinya apabila semua variabel bebas

yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Transparansi Kebijakan Publik dianggap tidak konstan atau mengalami perubahan, maka hasil dari persamaan regresi ganda untuk uji interaksi 2 berpengaruh negatif. Konstanta negatif artinya terjadi penurunan jumlah dari variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 6,523 satuan.

2. Rasio Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran memiliki koefisien regresi ganda untuk uji interaksi 2 positif sebesar 1,070 artinya Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran mengalami kenaikan satu satuan, maka Pengawasan Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,070 satuan.
3. Transparansi Kebijakan Publik memiliki koefisien regresi ganda untuk uji interaksi 2 sebesar 1,083 artinya jika Transparansi Kebijakan Publik mengalami kenaikan satu satuan, maka Pengawasan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar 1,083 satuan.
4. Moderating memiliki koefisien regresi ganda untuk uji regresi ganda negatif sebesar -0,013 artinya jika moderating mengalami penurunan satu satuan, maka Pengawasan Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,013 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya antara Moderating dan Pengawasan Keuangan Daerah mempunyai hubungan negatif. Penurunan moderating akan mengakibatkan penurunan pada Pengawasan Keuangan Daerah.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan di Daerah Kota dan Kabupaten Solok. Komitmen organisasi memperkuat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah di Kota dan Kabupaten Solok. Selain pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan, komitmen organisasi yang kuat juga akan memberikan dampak dalam pengawasan keuangan daerah. Transparansi kebijakan publik memperkuat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah di Kota dan Kabupaten Solok.

Bagi anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah terhadap anggaran dapat dilaporkan secara rinci.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi terhadap anggaran mempunyai hubungan yang memperkuat antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, maka anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok meningkatkan komitmen organisasi agar dalam mengambil keputusan tidak salah.

Daftar Pustaka

- Permatasari, D. D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019).
- Prasetya, A. B. (2014). *Analisis Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating*.
- Utama, M. H. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating*.
- Setyawati, Y. (2010). *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris di Karesidenan Surakarta)*.
- Mursalini, W. I. (2013). Analisis Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada CV. Business Ali Solok. *Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(3), 33–51.
- Mursalini, W. I., Husni, T., & Hamidi, M. (2017). Analysis of Cash Conversion Cycle and Sales Growth To Liquidity. *Sustainability Development in Achieving Economic Independence*, 266.